

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti ‘*government*’ yang hanya menyangkut aparatur negara, tetapi juga ‘*governance*’ yang menyangkut pada pengelolaan sumber daya publik. Istilah “kebijakan” dalam bahasa Inggris “*policy*” yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *polis* yang artinya *commuty* atau penguyuban (persekutuan) hidup manusia, masyarakat atau city (negara kota).

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sangsekerta dan Latin. “akar kata dalam bahasa Yunani dan Sangsekerta adalah *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia*(negara) dan akhirnya didalam bahasa Inggris pertengahan *policie* yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan”. (William N. Dunn,2003:52).

Kebijakan publik Menurut Dye (dikutip Leo Agustino,2012:7), kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Menurut Anderson (dikutip Leo Agustino,2012:7) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Frederich (dikutip Leo Agustino,2012:7) kebijakan publik yaitu “Serangkaian arah yang diusulkan seseorang, sekelompok pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt(dikutip Leo Agustino, 2012:7) kebijakan publik yaitu “keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari beberapa definisi tentang kebijakan publik di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintahan yang menitik beratkan pada masalah publik (umum) dan problem-problemnya.Berupa keputusan-keputusan yang mengandung berbagai pilihan untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dibuat untuk mencapai hasil-hasil tertentu, yakni mensejahterakan masyarakat.

1.2 Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan dan kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/ kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.

Menurut Payne (dikutip Rulan Ahmad, 2007:44) Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan dalam perspektif pembangunan ini disadari berapa pentingnya kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan mayerial. Sebagai suatu strategi pembangunan pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu kelain untuk memperoleh daya guna untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial termasuk dalam melakukan tindakan kemampuan dan kepercayaan untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya.

Menurut Moh. Ali Aziz (dikutip Rulan Ahmadi, 2007:136) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, di dorong untuk meningkatkan kemandirian di dalam mengembangkan perikehidupan mereka.

Menurut Medekhan Ali (dikutip Rulan Ahmadi, 2007:86) pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik.

Menurut Eko Sutoro (dikutip Rulan Ahmadi, 2007: 367) pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap lapisan-lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan.

Sedangkan parah ahli lain mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses memfasilitasikan warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerakan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

Kemudian dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upayah untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberikan dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mmengatur dan mengendalikan kengiatan masyarakat yang meberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

2.3 Pengertian Kemiskinan

Secara etimologis,"kemiskinan" berasal dari kata "miskin" yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departeman sosial dan badan pusat statistik

mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau kemiskinan (*poverty treshold*).

Kemiskinan menurut Suparlan(dikutip Taufik Ahmad 2015:45) bahwa kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Kemiskinan dapat juga dibedakan menjadi tiga pengertian, yaitu kemiskinan absolut, relatif, dan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok

masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

2.4 Program Keluarga Harapan (PKH)

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Kementerian Sosial RI Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH. Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jamkesmas untuk seluruh keluarga penerima PKH. Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan).

Menurut Kementerian Sosial RI untuk mendukung kegiatan program keluarga harapan maka upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah desa yaitu :

1. Koordinasi

Koordinasi yaitu kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tujuan dan fungsi program keluarga harapan berjalan dengan baik.

2. Sosialisasi dan komitmen

Sosialisasi adalah berisi muatan informasi, substansi pelaksanaan Program Keluarga Harapan, hasil kajian dan evaluasi PKH, kebijakan pelaksanaan PKH. Supaya terlaksana program keluarga harapan yang baik maka harus ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada masyarakat.

3. Monitoring dan Evaluasi

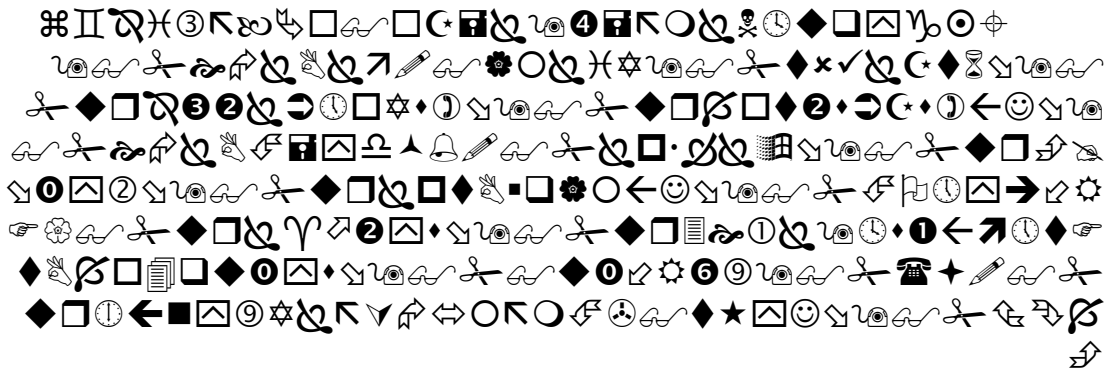
Monitoring yaitu memantau pelaksanaan program keluarga harapan sedangkan evaluasi yaitu untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program keluarga harapan.

2.5 Konsep Islam Tentang Mewujudkan Masyarakat Sejahtera

Mengenai wawasan masyarakat sejahtera dalam bingkai Al-Quran, Hamka (2006: 57) menguraikan bahwa ada dua bentuk masyarakat sejahtera yang dicatat oleh Al-Quran dan ditegaskan oleh para ulama. Ketiga bentuk tersebut memiliki perbedaan satu sama lain dalam karakteristik, sifat-sifat, landasan dan tiang penyangga yang menjadi sasaran.

Pertama, masyarakat sejahtera di dunia. Bentuk masyarakat ini telah terbangun dalam pikiran masyarakat Arab kala itu sebelum Al-Quran turun dan memberikan kabar gembira tentang surga dan neraka, atau dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Selain itu, model masyarakat ini merupakan cara untuk mengenali aib-aib yang telah dijelaskan oleh Al-Quran atasnya, yang sejatinya aib-aib tersebut sama

dengan aib masyarakat kapitalis, sebab keindahan dunia sebagai perhiasan bagi pandangan manusia.



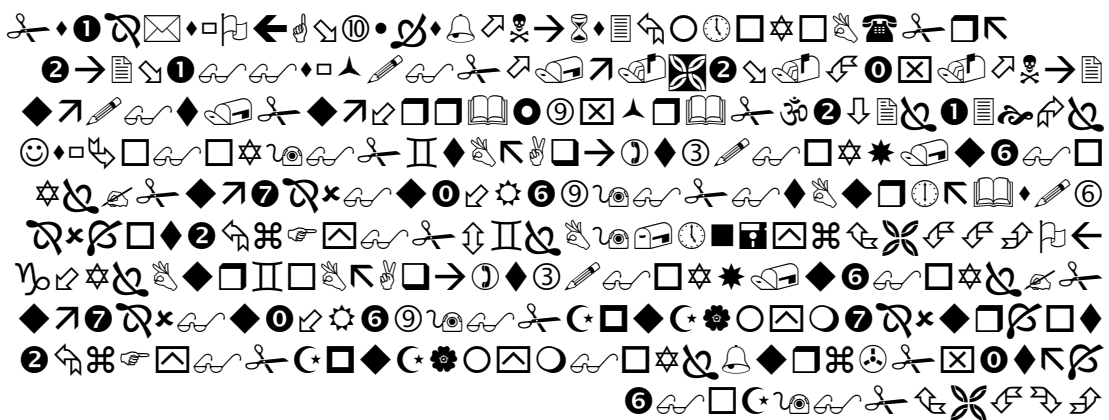
Artinya :

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Interpretasi ayat di atas, Abdulrahim (2002: 32) mengatakan bahwa ada enam prinsip yang menopang masyarakat sejahtera di dunia:

1. Wanita cantik yang menenteramkan suami, memuaskan nafsunya, menuntaskan kesenangannya, dan memenuhi kebutuhannya.
2. Anak-anak yang dijadikan sebagai kebanggaan, sandaran hidupnya dan melanjutkan estafet keturunan serta membuat orangtua tetap dikenang.
3. Kekayaan luas, serupa dengan perhiasan emas dan perak.
4. Kuda pilihan yang menjadi simbol kekayaan yang megah.
5. Binatang ternak yang dijadikan perhiasan ketika berdiam, berjalan, dan membawa perbekalan-perbekalan usaha.
6. Sawah ladang yang dapat memberikan semua bekal yang dibutuhkan.

Kedua, masyarakat sejahtera di dunia dan akhirat. Model masyarakat ini dalam bahasa Al-Maududi (1983: 14) disebut dengan istilah rifahiyah (yang menyenangkan) atau muthrifah (yang megah). Manusia diharuskan memenuhi panggilan untuk membentuk masyarakat ini dengan cepat dan segera. Hampir tidak ada yang terlintas dalam hati kecuali memenuhi panggilan tersebut. Potret kesejahteraan masyarakat di dunia ini dihasilkan dari aktivitas amal dan giat bekerja dalam wadah Islam, sebab yang menjadi jembatan emas antara kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah agama. Sehingga masyarakat muslim selalu diharuskan untuk berdoa sebagai potret dari masyarakat sejahtera di dunia dan di akhirat serta berlindung dari azab neraka.

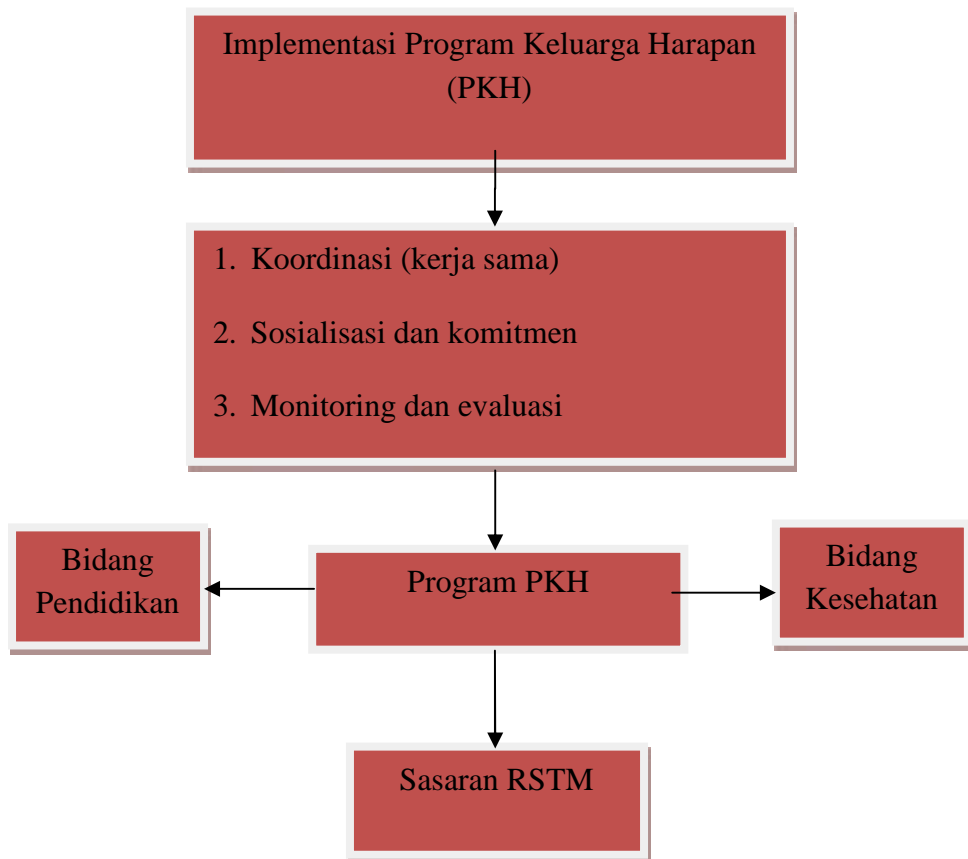


Artinya :

Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, Maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membanggakan) nenek moyangmu[126], atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami (kebaikan) di dunia", dan Tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat. dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka"

2.6 Kerangka Pemikiran

Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Upaya Pemerintah Desa Dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera sudah pernah dilakukan penelitian oleh peneliti diantaranya yaitu:

Nama Andrianto, dengan judul pelaksanaan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sibarakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Di Universitas Riau pada tahun 2010. Dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa kurangnya Ekonomi dan sumber daya alam (SDA) yang tidak Mencukupi.

Nama Dewi Karnova, dengan Judul Peranan Keluarga Harapan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Di Desa Padang Kunyit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Di Universitas Riau pada tahun 2012. Dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa peranan PKH ini untuk mengurangi kecacatan anak, mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan mengurangi angka kemiskinan.

Adapun alasan penulis untuk melakukan penelitian tentang Upaya Pemerintah Desa Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu penelitian ini mempunyai permasalahan yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah masalah, Bantuan yang diberikan belum tepat sasaran, sulitnya masalah pendataan Masyarakat, dan adanya para KKN, serta tempat penelitian ini dilakukan di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2.8 Depenisi Konsep

Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Masri Singarimbun, 1989: 33). Melalui konsep penelitian diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama yang lainnya.

Defenisi konsep dimaksudkan untuk menghindari inteperensi ganda dari variabel yang diteliti, untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi defenisi konsep pada penelitian ini adalah:

1. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.
2. Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.
3. Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
4. Program keluarga harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

5. Sasaran penerima bantuan PKH yaitu Ibu hamil/Nifas, Anak Balita, Anak SD dan SMP yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Masri Siangarimbun, 1989:46), sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui, indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut. Adapun yang menjadi indikator upaya pemerintah desa dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

- a. Defenisi Konsep

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan defenisi konsep pada karya ilmiah yang berjudul “ Upaya Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.

- b. Variabel

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah “Upaya Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

- c. Indikator

Indikator dalam penelitian ini adalah:

1. Koordinasi (kerja sama)
2. Sosialisasi dan komitmen

3. Monitoring dan evaluasi(Kementerian Sosial RI)

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil penelitian akan diambil kesimpulan maksimal yaitu apabila dari jawaban responden tentang Upaya Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, didapatkan jawaban 76-100%, sedangkan apabila jawaban responden kurang maksimal 51-75% maka Upaya Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dikatakan tidak maksimal, apabila jawaban responden 26-50% maka Upaya Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dapat dikatakan Tidak maksimal, selanjutnya Upaya Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dikatakan sangat tidak maksimal apabila jawaban responden 0-25%.